

Rencana Strategis Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dalam Meningkatkan Efektivitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Wido Novaldi Gusra¹, Syafwandi²
Universitas Putra Indonesia YPTK^{1,2}
Email: Widonovaldigusra@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 8 Bulan : Agustus Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<i>This study develops the strategic plan for the Government Bureau of West Sumatra Province for the period as an effort to enhance the effectiveness and efficiency of provincial government governance. The method employed is qualitative research based on literature review and analysis of official documents related to strategic planning and bureaucratic reform. SWOT analysis is applied to identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats faced by the government bureau. The findings highlight the need to strengthen human resources, integrate information technology, refine work procedures, and improve coordination among work units and stakeholders. The formulated strategic plan includes vision, mission, goals, targets, priority programs, and activities to support sustainable regional development and quality public services. Recommendations focus on improving HR capacity, bureaucratic innovation, and effective monitoring systems to achieve transparent and accountable governance.</i> Keyword: strategic plan, government bureau, West Sumatra Province, SWOT analysis, government governance.

Abstrak

Penelitian ini menyusun rencana strategis biro pemerintahan Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah provinsi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi literatur dan analisis dokumen resmi terkait perencanaan strategis dan reformasi birokrasi. Analisis SWOT diterapkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi biro pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan sumber daya manusia, integrasi teknologi informasi, penyempurnaan prosedur kerja, serta peningkatan koordinasi antar unit kerja dan pemangku kepentingan. Rencana strategis yang dirumuskan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan prioritas guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang berkualitas. Rekomendasi diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM, inovasi birokrasi, dan sistem monitoring yang efektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: rencana strategis, biro pemerintahan, Provinsi Sumatera Barat, analisis SWOT, tata kelola pemerintahan.

A. PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi biro pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Renstra ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat yang selaras dengan visi, misi, dan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, serta dinamika pemerintahan terkini.

Penyusunan Renstra bertujuan mengantisipasi tantangan dalam tata kelola pemerintahan provinsi, termasuk perubahan regulasi yang cepat, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, keterbatasan sumber daya manusia, dan kebutuhan integrasi teknologi informasi dalam birokrasi. Renstra berfungsi sebagai alat pengendalian serta evaluasi kinerja yang memastikan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Metode penyusunan Renstra melibatkan analisis mendalam terhadap kondisi internal dan eksternal biro pemerintahan melalui pendekatan SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Visi, misi, tujuan strategis, dan sasaran kerja disusun untuk mengarahkan pelaksanaan program yang terukur dan berdampak nyata. Selain itu, Renstra juga memuat mekanisme implementasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala guna memastikan pencapaian target dan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.

Dokumen Renstra Biro Pemerintahan ini diharapkan menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kapasitas biro, memperkuat koordinasi antar unit kerja, dan mewujudkan pemerintahan yang transparan, inovatif, dan profesional sesuai dengan prinsip good governance.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan analisis dokumen resmi terkait perencanaan strategis dan reformasi birokrasi di Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen perencanaan, regulasi, dan laporan pemerintah yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif yang menguraikan kondisi internal dan eksternal biro pemerintahan melalui analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perumusan strategi. Selanjutnya, sintesis konsep strategis dirumuskan berdasarkan hasil analisis tersebut

guna membangun visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan prioritas.

Validitas dan reliabilitas data dijaga dengan melakukan verifikasi silang antar sumber literatur yang kredibel dan terbaru dalam bidang tata kelola pemerintahan dan manajemen strategis. Pendekatan ini memastikan rancangan rencana strategis yang realistis dan sesuai dengan kondisi biro pemerintahan serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berperan membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama. Struktur biro terdiri dari beberapa bagian yang menangani pemerintahan umum, otonomi daerah, kerjasama, dan administrasi pemerintahan.^[1]

Analisis SWOT

- **Kekuatan (Strengths):**
 - Tersedianya struktur organisasi yang sesuai regulasi dan tugas pokok.
 - SDM yang berkompeten dalam administrasi pemerintahan dan otonomi daerah.
 - Dukungan teknologi informasi dalam administrasi dan pengelolaan data.
 - Pengalaman dalam koordinasi antar perangkat daerah dan monitoring kebijakan.
- **Kelemahan (Weaknesses):**
 - Kapasitas SDM dalam penguasaan teknologi baru dan manajemen strategis masih perlu ditingkatkan.
 - Prosedur kerja dan standar operasional belum optimal dan belum merata.
 - Koordinasi lintas unit yang masih dapat diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas.
- **Peluang (Opportunities):**
 - Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi terkait reformasi birokrasi.
 - Kemajuan teknologi informasi yang dapat mempermudah pelayanan dan administrasi.
 - Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang transparan dan responsif.
- **Ancaman (Threats):**
 - Perubahan regulasi dan kebijakan yang cepat menuntut adaptasi yang sigap.

- Kompleksitas pelayanan publik yang terus meningkat dan beragam.
- Potensi resistensi internal terhadap perubahan dan inovasi.

Identifikasi Isu Strategis

- Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen pemerintahan dan teknologi informasi.
- Penyempurnaan prosedur kerja dan standarisasi administrasi.
- Penguatan koordinasi antar unit kerja dan dengan perangkat daerah lainnya.
- Pengembangan pelayanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi.

Perumusan Visi dan Misi

- **Visi:** Menjadi biro pemerintahan yang profesional, inovatif, dan terintegrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang transparan dan akuntabel.
- **Misi:**
 - a. Meningkatkan kualitas SDM dan pengelolaan administrasi pemerintahan.
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengelolaan data.
 - c. Memperkuat koordinasi internal dan eksternal biro pemerintahan.
 - d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh proses kerja.

Strategi dan Program Prioritas

- Pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM biro pemerintahan.
- Penyusunan dan penerapan SOP yang standarisasi di seluruh bagian.
- Implementasi sistem informasi manajemen terpadu yang memudahkan koordinasi dan monitoring.
- Optimalisasi forum koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Mekanisme Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi

- Penyusunan rencana aksi tahunan yang terintegrasi dan realistis.
- Monitoring berkala oleh pimpinan biro dan pengawasan internal sesuai regulasi.
- Evaluasi kinerja menggunakan indikator kunci yang terukur dan transparan.
- Pelaporan hasil monitoring sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kebijakan berkelanjutan.

Hasil ini menunjukkan bahwa rencana strategis Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi teknologi, dan penguatan koordinasi untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang

baik. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.^[1]

D. KESIMPULAN

Rencana Strategis Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat difokuskan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di tingkat provinsi. Analisis SWOT mengidentifikasi perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, serta peningkatan koordinasi antar unit kerja dan pemangku kepentingan. Strategi yang dirumuskan mencakup pengembangan kompetensi SDM, standar prosedur operasional, implementasi sistem informasi manajemen terpadu, dan penguatan sinergi lintas perangkat daerah. Rencana ini diharapkan dapat mewujudkan biro pemerintahan yang profesional, inovatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Rekomendasi

- Melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM secara terencana dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern.
- Menstandarisasi dan menyempurnakan prosedur kerja serta administrasi supaya pelaksanaan tugas lebih efisien dan konsisten.
- Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, khususnya sistem informasi manajemen yang terpadu untuk mendukung koordinasi, monitoring, dan evaluasi.
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara biro pemerintahan dengan perangkat daerah lain serta pemangku kepentingan yang terkait.
- Menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala dengan indikator kinerja yang jelas untuk memastikan pencapaian sasaran strategis dan perbaikan berkelanjutan.
- Melakukan kajian dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan renstra guna menyesuaikan dengan dinamika lingkungan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Langkah-langkah tersebut akan memperkuat tata kelola pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal dan berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat. (2022). Rencana Strategis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat 2022–2026. Padang: Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Jakarta: Kemendagri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Bryson, J. M. (2000). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. San Francisco: Jossey-Bass.
- Mulyadi. (2019). Manajemen Strategis dan Perencanaan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugroho, Y., & Wibowo, A. (2022). Analisis SWOT dalam Rencana Strategis Organisasi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 45-60.
- Laporan Internal Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. (2023). Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan. Padang: Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, B., & Handayani, E. (2021). Implementasi Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 8(2), 112-126.